

Pengaruh PDRP Perkapita Terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2021 dalam Perspektif Ekonomi Islam

¹Yerna Wiza (Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi),
Yernawiza1510@gmail.com

²Hesi Eka Puteri (Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi),
hesiekaputeri@gmail.com

Abstract

This study aims to measure the effect of per capita GRDP on provincial income disparities in Indonesia in 2017-2021 and to analyze how Islamic economics views disparities and the factors that influence them. This research was conducted using a quantitative approach with secondary data obtained from the National Statistics Center from 2017 to 2021 using documentation data collection techniques. The data analysis method used is panel data regression analysis, panel data classical assumption test and regression model feasibility test with the help of Eviews 12 SV. In this study it was found that the level of GRDP per capita (X) has a negative effect on the level of provincial income disparities in Indonesia (Y). This can be seen in the results of the t test where the t test column is -3.74146 and the t table is -1.97427, which means that the t count is smaller than the t table so based on the decision making criteria Ho is rejected. The magnitude of this influence can be seen in the analysis of the coefficient of determination (R Squared) which shows that the influence of the per capita GRDP level on income disparity is 94.42%, which means that the per capita GRDP level has a significant effect on income disparity and the rest is influenced by other variables not examined.

Keywords: GRDP Per Capita; Disparity; Well-being

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh PDRB Perkapita terhadap disparitas pendapatan provinsi di Indonesia tahun 2017-2021 dan untuk menganalisis bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang disparitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2017 sampai dengan 2021 menggunakan teknik pengambilan data dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan analisis regresi data panel, uji asumsi klasik data panel dan uji kelayakan model regresi dengan bantuan Eviews 12 SV. Pada penelitian ini didapatkan bahwa tingkat PDRB Perkapita (X) berpengaruh negatif terhadap tingkat disparitas pendapatan provinsi di Indonesia (Y). Hal ini dapat dilihat pada hasil uji t yang dilakukan dimana pada kolom uji t didapatkan nilai -3,74146 dan t tabel sebesar -1,97427 yang artinya t hitung lebih kecil daripada t tabel sehingga berdasarkan kriteria pengambilan keputusan maka Ho ditolak. Besarnya pengaruh ini dapat dilihat pada analisis koefisien determinasi (R Squared) yang didapatkan hasil pengaruh tingkat PDRB perkapita terhadap disparitas pendapatan adalah 94,42% yang artinya tingkat PDRB perkapita berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Kata Kunci: PDRB Perkapita; Disparitas; Kesejahteraan

I. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi adalah salah satu cara yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk pemerataan ekonomi di berbagai wilayah dan dengan adanya pembangunan ekonomi ini akan mudah untuk melakukan pemerataan ekonomi. Pembangunan ekonomi menurut

Wildani adalah suatu usaha yang dilakukan dalam perekonomian bermaksud untuk mengembangkan kegiatan pekonomian sehingga akan meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf pendidikan serta teknologi (Khotami, 2019). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembangunan ekonomi tidak hanya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat saja namun juga berperan dalam meningkatkan pendidikan dan teknologi sehingga dapat tercapai kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh.

Ketimpangan pendapatan atau disparitas pendapatan adalah suatu keadaan dimana terdapat perbedaan pendapatan antar daerah yang signifikan. Hal ini tidak dapat dibiarkan terjadi secara berkepanjangan karena hal ini akan mengganggu suatu wilayah untuk mencapai tujuannya yaitu mensejahterakan seluruh rakyat dan merata. apabila disparitas pendapatan ini dibiarkan begitu saja maka akan memicu timbulnya permasalahan lain seperti meningkatnya angka kemiskinan dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga untuk meminimalisir terjadinya hal ini maka dibutuhkan adanya strategi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Islam, Allah SWT. memerintahkan manusia untuk mendistribusikan pendapatannya agar kekayaan tidak beredar pada sebagian orang dan menghindari terjadinya disparitas pendapatan yang dapat menjadikan orang yang miskin semakin sengsara dan yang kaya menjadi lebih kaya lagi (Qodir, 2021). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs. Al-Hasyr ayat 7, yaitu:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَكُمْ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*” (Qs. Al-Hasyr:7)

Menurut Qs. Al-Hasyr ayat 7 diatas dijelaskan bahwa semua harta yang diberikan Allah kepada hamba-Nya tidak diperuntukkan untuk satu orang saja melainkan terdapat hak-hak orang lain didalamnya. Dalam ayat ini Allah juga memerintahkan untuk mendistribusikan harta yang telah didapatkan sehingga harta tersebut tidak beredar disebagin orang saja dan sehingga semua masyarakat dapat menikmati kesejahteraan. Allah juga memerintahkan untuk bertaqwa kepadanya-Nya dan meninggalkan semua yang dilarang.

Disparitas pendapatan dapat diukur dengan nilai indeks gini atau *gini ratio* dimana nilai disparitas pendapatan berkisar antara 0 sampai dengan 1 dan disparitas pempdapatan dikatakan tinggi apabila nilainya mendekati 1. Berikut ini adalah nilai indeks gini provinsi yang ada di Indonesia:

Tabel 1. *Gini Ratio* Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2021

Provinsi	Gini Ratio Menurut Provinsi di Indonesia				
	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	0,329	0,318	0,321	0,319	0,323
Sumatera Utara	0,335	0,311	0,315	0,314	0,313
Sumatera Barat	0,312	0,305	0,307	0,301	0,30
Riau	0,325	0,347	0,331	0,321	0,327

Jambi	0,334	0,335	0,324	0,316	0,315
Sumatera Selatan	0,365	0,341	0,339	0,338	0,34
Bengkulu	0,349	0,355	0,329	0,323	0,321
Lampung	0,333	0,326	0,331	0,32	0,314
Kep, Bangka Belitung	0,276	0,272	0,262	0,257	0,247
Kep, Riau	0,359	0,339	0,337	0,334	0,339
DKI Jakarta	0,409	0,39	0,391	0,4	0,411
Jawa Barat	0,393	0,405	0,398	0,398	0,406
Jawa Tengah	0,365	0,357	0,358	0,359	0,368
DI Yogyakarta	0,44	0,422	0,428	0,437	0,436
Jawa Timur	0,415	0,371	0,364	0,364	0,364
Banten	0,379	0,367	0,361	0,365	0,363
Bali	0,379	0,364	0,37	0,369	0,375
Nusa Tenggara Barat	0,378	0,391	0,374	0,386	0,384
Nusa Tenggara Timur	0,359	0,359	0,355	0,356	0,339
Kalimantan Barat	0,329	0,325	0,318	0,325	0,315
Kalimantan Tengah	0,327	0,3440	0,335	0,32	0,32
Kalimantan Selatan	0,347	0,34	0,334	0,351	0,325
Kalimantan Timur	0,333	0,342	0,335	0,335	0,331
Kalimantan Utara	0,313	0,304	0,292	0,3	0,285
Sulawesi Utara	0,394	0,372	0,376	0,368	0,359
Sulawesi Tengah	0,345	0,317	0,33	0,321	0,326
Sulawesi Selatan	0,429	0,388	0,391	0,382	0,377
Sulawesi Tenggara	0,404	0,392	0,393	0,388	0,394
Gorontalo	0,405	0,417	0,41	0,406	0,409
Sulawesi Barat	0,339	0,366	0,365	0,356	0,366
Maluku	0,321	0,326	0,32	0,326	0,316
Maluku Utara	0,33	0,336	0,31	0,29	0,278
Papua Barat	0,387	0,391	0,381	0,376	0,374
Papua	0,398	0,398	0,391	0,395	0,396
Indonesia	0,391	0,384	0,380	0,385	0,381

Sumber: Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah

Dari tabel 1 secara umum dapat dilihat nilai indeks gini Indonesia terus menurun dari tahun 2017 hingga 2019 dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 namun kembali turun pada 2021 yang artinya kondisi perekonomian di Indonesia secara keseluruhan dapat dikatakan merata dan sejahtera meskipun pada tahun 2020 tingkat disparitas atau ketimpangan mengalami kenaikan namun hal itu tidak berlangsung lama dimana tingkat disparitas pendapatan kembali menurun pada tahun 2021 yang artinya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum mengalami peningkatan.

Tingkat PDRB Perkapita merupakan salah satu penyebab terjadinya disparitas pendapatan ini. PDRB Perkapita ini menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat perorangan sehingga PDRB Perkapita dipengaruhi oleh dua faktor yaitu tingkat pendapatan atau PDRB dan jumlah penduduk. Dikatakan bahwa jika jumlah penduduk meningkat maka hal ini cenderung berdampak negatif bagi penduduk miskin. Ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan juga akan berdampak besar pada keluarga miskin terlebih lagi banyak keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga yang ramai sehingga hal tersebut dapat memperburuk keadaan perekonomiannya dan

menyebabkan masyarakat miskin akan terus berada dalam garis kemiskinan (Silastri, 2017). Berikut ini adalah nilai PDRB Perkapita provinsi-provinsi di Indonesia:

Tabel 2. Tingkat PDRB Perkapita Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2021

Provinsi	Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRB Perkapita)				
	Indonesia Tahun 2017-2021 (Ribuan Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	23.362,90	24.013,79	24.842,3	25.018,28	25.357,7
Sumatera Utara	34.183,58	35.570,5	36.853,59	36.175,16	36.666,2
Sumatera Barat	29.312,17	30.470,8	31.427,29	30.696,21	31.360,79
Riau	70.740,43	70.736,77	72.509,14	76.884,74	77.995,51
Jambi	38.833,87	40.025,52	41.812,35	41.926,04	42.906,66
Sumatera Selatan	34.059,71	35.659,82	37.125,75	37.323,24	38.172,97
Bengkulu	21.751,64	22.494,84	23.504,53	23.105,92	23.539,17
Lampung	26.614,88	27.736,26	28.894,5	26.746,64	27.193,59
Kep, Bangka Belitung	34.933,52	35.762,04	37.173,14	36.307,61	37.585,5
Kep, Riau	79.743,68	81.206,2	81.138,52	85.012,58	85.425,89
DKI Jakarta	157.636,6	165.768,99	174.812,51	170.089,02	174.941,72
Jawa Barat	27.970,92	29.160,06	30.413,37	30.180,54	30.907,59
Jawa Tengah	26.088,91	27.285,25	28.695,92	26.483,68	27.144,18
DI Yogyakarta	24.533,8	25.776,31	27.008,68	27.754,47	28.918,82
Jawa Timur	37.724,29	39.579,95	41.512,2	39.686,19	40.821,89
Banten	32.947,6	34.183,75	35.913,9	37.165,16	38.217,8
Bali	34.129,84	35.896,35	37.297,5	34.216,52	32.975,85
Nusa Tenggara Barat	19.091,26	18.020,5	18.219,11	17.583,11	17.706,47
Nusa Tenggara Timur	11.863,41	12.273,85	12.761,98	12.960,95	13.092,81
Kalimantan Barat	25.198,01	26.110,57	27.199,78	24.953,61	25.811,97
Kalimantan Tengah	34.370,63	35.548,43	37.870,47	37.148,73	37.925,62
Kalimantan Selatan	29.578,79	30.614,85	31.611,46	32.212,3	32.849,02
Kalimantan Timur	126.625,19	127.354,19	134.410,55	125.764,53	127.208,24
Kalimantan Utara	78.918,57	80.204,84	88.299,52	86.823,59	88.510,41
Sulawesi Utara	32.297,08	33.911,61	35.687,44	33.670,44	34.787,33
Sulawesi Tengah	32.860,48	39.049,35	42.054,5	45.052,32	49.587,96
Sulawesi Selatan	33.234,11	35.243,64	37.474,29	36.246,26	37.572,54
Sulawesi Tenggara	31.894,42	33.278,66	35.309,9	35.708,6	36.581,67
Gorontalo	21.477,78	22.538,55	24.167,56	24.313,38	24.649,73
Sulawesi Barat	22.001,01	22.953,08	24.163,56	22.666,22	22.896,2
Maluku	15.942,45	16.607,02	17.556,86	16.688,12	17.020,46
Maluku Utara	19.192,97	20.309,45	21.524,99	21.915,03	25.199,92
Papua Barat	62.169,96	64.499,45	64.418,52	54.487,7	52.980,01
Papua	45.577,05	48.069,41	40.203,42	32.108,51	36.431,25
Indonesia	37.851,37	39.340,56	41.021,61	39.778,68	40.780,31

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Ribu Rupiah)

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa PDB Perkapita Indonesia mengalami kenaikan yang tinggi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2021 yang artinya pendapatan Indonesia secara keseluruhan mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya dipengaruhi oleh pandemi yang melanda.

Dari uraian diatas terdapat beberapa permasalahan yaitu adanya beberapa provinsi yang nilai PDRB Perkapitanya meningkat namun disparitas pendapatan juga naik sehingga tidak sesuai dengan teori yang mengatakan apabila PDRB Perkapita meningkat maka disparitas pendapatan akan menurun. Berdasarkan masalah pada penelitian ini maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

Ha: Diduga tingkat PDRB Perkapita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan provinsi di Indonesia tahun 2017-2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh PDRB Perkapita terhadap disparitas pendapatan di berbagai provinsi di Indonesia pada 2017-2021 dan untuk menganalisis bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang disparitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

II. Kajian Pustaka

A. Disparitas Pendapatan

1. Pengertian Disparitas Pendapatan

Disparitas pendapatan adalah suatu ukuran atas perbedaan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat. Disparitas pendapatan juga disebut sebagai kesenjangan atau perbedaan pendapatan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu perbedaan sumber daya alam dan manusia serta infrastruktur daerah. Pembangunan perekonomian merupakan salah satu cara yang dapat meningkatkan distribusi pendapatan. (Nurhayati, 2015). Kuznets mengatakan bahwa pada tahapan awal pembangunan ekonomi suatu daerah akan mengalami pembagian pendapatan yang buruk atau tidak merata namun pada tahap proses pertumbuhan ekonomi selanjutnya pembagian pendapatan ini akan mulai merata terhadap seluruh masyarakat (Arsyad, 2010).

Adanya perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah merupakan pengaruh dari disparitas pendapatan ini yang nantinya dapat berimbas pada adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah serta adanya dampak pada rencana atas kebijakan pembangunan wilayah dan dilaksanakan oleh pemerintah setempat.

2. Faktor Penyebab Disparitas Pendapatan

Menurut Emilia dan Imelia terdapat beberapa faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan ekonomi, yaitu (Nurhayati, 2015):

- a. Kegiatan ekonomi wilayah yang terkonsentrasi dan terfokus pada beberapa daerah saja akan menyebabkan adanya perbedaan pendapatan antar daerah
- b. Adanya alokasi dari investasi yang tidak merata dapat menyebabkan tidak adanya kegiatan ekonomi yang produktif pada daerah yang tidak mendapatkan alokasi dana investasi
- c. Pada faktor produksi dipengaruhi oleh rendahnya tingkat mobilitas faktor produksi antar wilayah sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan pertumbuhan ekonomi antar wilayah

- d. Perbedaan sumber daya alam sebagai modal utama dalam proses produksi
 - e. Perbedaan demografi antar wilayah terutama mengenai pertumbuhan serta jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan kesehatan, tingkat kepadatan penduduk serta disiplin masyarakat dan etos kerja
 - f. Pada perdagangan juga terdapat hal yang mempengaruhinya yaitu kurang lancarnya perdagangan antar daerah karena kurangnya transportasi dan komunikasi
3. Indikator Yang Menggambarkan Disparitas Pendapatan
- Indikator yang dapat menunjukkan tingkat disparitas pendapatan adalah:
- a. Tingkat kesejahteraan penduduk yang diukur dengan pendapatan perkapita
 - b. Kualitas pendidikan sebagai langkah yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat
 - c. Pola penyebaran dan konsentrasi investasi sebagai modal dalam peningkatan kualitas dan kuantitas produksi
 - d. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam proses produksi

4. Disparitas Pendapatan Dalam Ekonomi Islam

Disparitas pendapatan terjadi karena tidak adanya penyebaran atau distribusi pendapatan yang lancar diantara masyarakat. Disparitas pendapatan merupakan suatu proses penyaluran harta dari suatu pihak ke pihak lain yang bertujuan agar semua individu sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua masyarakat (Kalsum, 2018). Dalam Islam terdapat dua sistem pendistribusian pendapatan yaitu melalui distribusi komersial yang mengikuti aspek pasar seperti jual beli dan distribusi yang mengikuti keadilan sosial dimana tidak mengharapkan balasan dari kegiatan yang dilakukan seperti sedekah, zakat dan waris.

B. PDRB Perkapita

1. Pengertian PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai yang didapatkan dari keseluruhan aktivitas produksi pada perekonomian daerah, yang artinya timbal balik terhadap faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi dapat digambarkan melalui tingkat PDRB. (Maryam Jamilah An Hasibuan, 2019).

PDRB Perkapita merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah. Hal ini karena PDRB Perkapita dapat menggambarkan bagaimana pendapatan suatu daerah dan bagaimana kemampuannya dalam mendistribusikan pendapatan tersebut. PDRB Perkapita sangat dipengaruhi oleh sumber daya alam yang tersedia sehingga tingkat PDRB Perkapita akan bervariasi pada setiap daerah. Selain itu PDRB Perkapita juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk suatu daerah.

2. Faktor Penentu PDRB Perkapita

Faktor-faktor yang menentukan tingkat PDRB Perkapita adalah nilai PDRB dan jumlah penduduk. PDRB merupakan nilai keseluruhan dari semua aktivitas

produksi pada suatu wilayah, dapat dikatakan PDRB merupakan total pendapatan pada suatu daerah dan bisa dihitung dengan 3 pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Nilai PDRB dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendapatan asli daerah, kredit, tabungan dan belanja daerah. PDRB juga disusun oleh beberapa indikator yaitu upah/gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan atau laba. Jumlah penduduk merupakan jumlah keseluruhan masyarakat yang bertempat tinggal di suatu daerah. Jika jumlah penduduk tinggi maka akan berpotensi untuk menghambat pembangunan daerah karena akan menyebabkan tingginya konsumsi di masa mendatang, mengancam sumber daya alam dan mempersulit dalam melakukan perubahan ekonomi dan sosial. Jumlah penduduk ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk. Untuk mendapatkan nilai PDRB Perkapita, maka total pendapatan atau nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut sehingga didapatkan pendapatan perkapita.

3. Hubungan PDRB Perkapita Dengan Disparitas Pendapatan

PDRB Perkapita dapat menggambarkan pendapatan perorangan pada suatu daerah. Nilai PDRB Perkapita ini sangat dipengaruhi oleh sumber daya alam, jumlah penduduk dan kemampuan daerah untuk mendistribusikan pendapatan yang diperolehnya sehingga akan mengakibatkan adanya perbedaan atau disparitas antar daerah. Daerah dengan sumber daya alam yang tinggi dan jumlah penduduk yang rendah dan berkualitas akan memperoleh nilai PDRB Perkapita yang tinggi dan sebaliknya daerah dengan sumber daya alam yang sedikit namun jumlah penduduk tinggi dan tidak berkualitas maka nilai PDRB Perkapitanya akan rendah.

4. PDRB Perkapita Dalam Ekonomi Islam

Tingkat kesejahteraan penduduk disuatu daerah dapat dilihat dari tingkat PDRB Perkapita daerah tersebut. Apabila PDRB Perkapita daerah tersebut tinggi maka dapat dikatakan masyarakat daerah tersebut sejahtera dan begitu pula sebaliknya. Tingkat PDRB Perkapita ini sangat dipengaruhi oleh sumber daya alam suatu daerah dan menurut kaum kapitalis sumber daya alam ini sangat minim dan terbatas namun dalam Islam hal ini sama sekali bertentangan dimana dalam Islam dikatakan bahwa sumber daya alam yang tersedia sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan sesuai dengan kapasitasnya. Maka dari hal itu dibutuhkan kebijakan manusia dalam mengalokasikan sumber daya alam tersebut dengan maksimal.

III. Metode Penelitian

Metode kuantitatif deskriptif merupakan metode yang digunakan pada penelitian ini dimana metode ini bertujuan menguji teori objektif dengan menguji hubungan antar variabel menggunakan data yang dapat diukur dengan prosedur statistik dengan data sekunder berbentuk data panel yang didapatkan dari *website* resmi BPS. Kasus pada penelitian ini terjadi di berbagai provinsi di Indonesia pada tahun 2017-2021. Variabel yang digunakan

pada penelitian ini adalah PDRB Perkapita sebagai variabel independen (X) dan disparitas pendapatan sebagai variabel dependen (Y). Data pada penelitian ini didapatkan dengan teknik studi dokumentasi data statistik. Analisis regresi data panel adalah teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini dengan pemilihan model estimasi regresi data panel dengan uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier, uji asumsi klasik data panel dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi serta uji kelayakan model regresi dengan uji parsial (uji t) dan uji koefisien determinasi (r squared) dengan bantuan Eviews 12 SV

Persamaan regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \epsilon_{it} \quad (1)$$

Keterangan:

Y = Disparitas Pendapatan

α = Konstanta

β = Koefisien Variabel Independen

X = PDRB Perkapita

ϵ = Koefisien *Error*

i = Provinsi di Indonesia

t = waktu, yaitu dari tahun 2017-2021

IV. Hasil Dan Pembahasan

A. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan yang kemudian disusun, diolah kemudian dianalisis untuk menggambarkan masalah yang ada pada penelitian. Analisis deskriptif merupakan statistik yang dipakai untuk menganalisis data penelitian Berikut hasil uji analisis deskriptif.

Tabel 3. Uji Analisis Deskriptif

	X	Y
Mean	42.439,20	0,351271
Median	33.985,66	0,346000
Maximum	174.941,7	0,440000
Minimum	11.863,41	0,247000
Std. Dev	31.729,39	0,038139
Observasi	170	170

Sumber: Data Diolah dengan Eviews

Dari tabel 3 diatas diketahui jumlah observasi dalam penelitian ini sebanyak 170. Nilai tertinggi dari PDRB Perkapita terdapat pada Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 yaitu sebesar 174.941,7 Ribu Rupiah dan nilai PDRB Perkapita terendah ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 sebesar 11.863,41 Ribu Rupiah. Tingkat disparitas pendapatan atau gini rasio tertinggi berada pada Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2017 dan nilai gini rasio terendah berada pada Provinsi Kep. Bangka Belitung pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,247.

B. Analisis Inferensial

Terdapat tiga cara estimasi model regresi data panel yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM).

1. Model Estimasi Regresi Data Panel

a. *Common Effect Model*

Pendekatan pada model *common effect* memberikan asumsi bahwa intersep dan slope tetap sepanjang waktu dan individu, setelah itu adanya perbedaan antara intersep dan slope diasumsikan akan dijelaskan oleh variabel gangguan. Hasil regresi model *common effect* dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah.

Tabel 4. Hasil Uji *Common Effect Model*

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Signifikansi
C	0,349405	71,22646	0,0000
X	4,40E-08	0,474440	0,6358
R-Squared	0,001338		
F-Statistik	0,225093		
Signifikansi (F-Statistik)	0,635802		

Sumber: Data Diolah dengan Eviews

Pada hasil uji *common effect model* didapatkan bahwa pengaruh variabel PDRB Perkapita terhadap variabel disparitas pendapatan adalah positif. Artinya jika tingkat PDRB Perkapita meningkat maka tingkat disparitas pendapatan juga akan meningkat, berdasarkan teori yang telah dibahas sebelumnya fakta ini tentu bertentangan dimana dikatakan bahwa hubungan antara PDRB Perkapita dengan disparitas pendapatan adalah negatif.

b. *Fixed Effect Model*

Pada pendekatan model *fixed effect* memberikan asumsi perilaku data antar provinsi dalam satu rentang waktu. Pada pendekatan model *fixed effect* ini tidak diperhatikan aspek dimensi individu maupun waktunya. Hasil *fixed effect model* pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Hasil Uji *Fixed Effect Model*

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Signifikansi
C	0,401167	30,08286	0,0000
X	-1,18E-06	-3,14E-07	0,0003
R-Squared	0,942799		
F-Statistik	65,44454		
Signifikansi (F-Statistik)	0,000000		

Sumber: Data Diolah dengan Eviews

Pada hasil uji *fixed effect model* didapatkan bahwa pengaruh variabel PDRB Perkapita terhadap variabel disparitas pendapatan adalah negatif. Artinya jika tingkat PDRB Perkapita meningkat maka tingkat disparitas pendapatan akan menurun, hal ini tentu saja sesuai dengan teori yang ada yang telah dibahas sebelumnya dimana dikatakan bahwa hubungan antara PDRB Perkapita dengan disparitas pendapatan adalah negatif.

c. *Random Effect Model*

Pada metode *random effect* terdapat asumsi yang mengatakan bahwa setiap variabel terdapat perbedaan intersep yang sifatnya random. Residual yang digunakan dalam *random effect model* ini adalah residual yang mempunyai hubungan antar waktu dan objek. Hasil metode *random effect* pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Hasil Uji *Random Effect Model*

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Signifikansi
C	0,364787	37,29100	0,0000
X	-3,18E-07	-1,848968	0,0662
R-Squared	0,018876		

F-Statistik	3,232204
Signifikansi (F-Statistik)	0,073999

Sumber: Data Diolah Menggunakan Eviews

Pada hasil uji *random effect model* didapatkan bahwa pengaruh variabel PDRB Perkapita terhadap variabel disparitas pendapatan adalah negatif. Artinya jika tingkat PDRB Perkapita meningkat maka tingkat disparitas pendapatan menurun, dimana hal ini sesuai dengan teori yang ada yang telah dibahas sebelumnya dimana dikatakan bahwa hubungan antara PDRB Perkapita dengan disparitas pendapatan adalah negatif. Selanjutnya perlu dilakukannya pemilihan model yang paling tepat diantara ketiga model diatas untuk digunakan pada penelitian ini.

2. Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Pemilihan model estimasi regresi data pannel dilakukan dengan beberapa pengujian, yaitu:

a. Uji Chow

Uji chow bertujuan untuk melakukan pemilihan antara metode *common effect* atau *fixed effect* manakah yang lebih tepat untuk digunakan dalam mengolah data. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Ho : *common effect model* yang tepat daripada *fixed effect model*

Ha : *fixed effect model* yang tepat daripada *common effect model*

Pengambilan keputusan pada uji chow dilakukan jika:

- 1) Nilai Prob. F < batas kritis (α) 0,05, jadi Ho ditolak sehingga *fixed effect model* terpilih dan lebih baik daripada *common effect model*
- 2) Nilai Prob. F > batas kritis (α) 0,05, sehingga Ho diterima dan *common effect model* terpilih dan lebih tepat daripada *fixed effect model*

Berikut adalah output dari uji chow yang dilakukan:

Tabel 7. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistik	Signifikansi
Cross-section F	67,332009	0,0000
Cross-section Chi-squared	486,174769	0,0000
F-Statistik	0,225093	
Signifikansi (F-Statistik)	0,635802	

Sumber: Data Diolah dengan Eviews

Dari tabel 7 didapatkan nilai Probabilitas Cross-Section Chi-squares adalah 0,0000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Menurut cara penarikan kesimpulan diatas maka Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya *fixed effect model* lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian ini dibandingkan dengan *common effect model*.

b. Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk melakukan pemilihan mana yang lebih tepat digunakan pada penelitian ini antara model *fixed effect* atau *random effect*. hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Ho : *random effect model* lebih tepat daripada *fixed effect model*

Ha : *fixed effect model* lebih tepat daripada *random effect model*

Pengambilan keputusan pada uji hausman dilakukan jika:

- 1) Nilai *chi squares* hitung > *chi squares* tabel atau nilai probabilitas *chi squares* < taraf signifikansi, maka Ho ditolak atau *fixed effect* terpilih lebih tepat dari pada *random effect*

- 2) Nilai *chi squares* hitung < *chi squares* tabel atau nilai probabilitas *chi squares* > taraf signifikansi, maka H_0 diterima atau *random effect* terpilih lebih tepat dari pada *fixed effect*

Berikut adalah output dari uji hausman yang dilakukan:

Tabel 8. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Statistik	Signifikansi
Cross-section Random	10,692602	0,0011
F-Statistik	65,44454	
Signifikansi (F-Statistik)	0,000000	

Sumber: Data Diolah dengan Eviews

Berdasarkan tabel 8 didapatkan hasil dari nilai Probabilitas (*chi squares statistic*) adalah 0,0011 dimana nilai ini daripada taraf signifikansi 0,05 lebih kecil. Menurut cara pengambilan keputusan maka H_0 ditolak dan terima H_a , yang artinya *fixed effect model* lebih tepat digunakan pada penelitian ini dibandingkan *random effect model*.

- c. Uji Lagrange Multiplier

Uji lagrange multiplier dilakukan untuk memilih antara *random effect model* atau *common effect model* manakah yang lebih tepat digunakan dalam pengolahan data pada penelitian ini. Namun pada uji chow dan uji hausman yang telah dilakukan telah terpilih *fixed effect model* yang lebih tepat untuk digunakan daripada *random effect model* dan *common effect model* sehingga uji hausman tidak diperlukan lagi pada penelitian ini.

3. Uji Asumsi Klasik Regresi Data Panel

- a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui bagaimana distribusi data pada model regresi, apakah variabel dependen dan variabel independen berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini digunakan asumsi *Central Limit Theorem*. Dimana menurut Damodar N Gujarati jika jumlah sampel lebih dari 30 ($n > 30$) maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa data tetap akan dianggap normal meskipun hasil pengujian normalitas yang dilakukan tidak berdistribusi normal namun karena sampel pada penelitian ini berjumlah 170.

- b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan antara regresi dengan variabel bebas. Apabila tidak terdapat hubungan antara regresi dengan variabel bebas maka dapat dikatakan bahwa regresi tersebut lebih baik. Namun uji multikolinearitas tidak dibutuhkan pada penelitian ini karena hanya terdapat satu variabel bebas saja.

- c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah model yang terbentuk memiliki varians yang konstan atau tidak. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut.

H_0 : tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model regresi

H_a : terdapat masalah heteroskedastisitas pada model regresi

Kaidah keputusan dari uji heteroskedastisitas metode uji glejser adalah sebagai berikut:

- 1) H_0 diterima apabila nilai probabilitas *t-statistic* variabel bebas lebih besar daripada taraf signifikansi (α) 5% atau 0,05

- 2) H_0 ditolak apabila nilai *probabilitas t-statistic* variabel bebas lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 5% atau 0,05

Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Signifikansi
C	0,030968	11,58965	0,0000
X	2,10E-08	0,416915	0,6773
R-Squared	0,001034		
F-Statistik	0,173818		
Signifikansi (F-Statistik)	0,677273		

Sumber: Data Diolah dengan Eviews

Dari tabel 9 didapatkan nilai probabilitas t-statistik untuk X adalah 0,6773 dimana nilai ini lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat hubungan antara waktu sebelum dengan sesudah *time series*. Uji autokorelasi pada penelitian ini dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson menggunakan hipotesis:

H_0 : tidak terdapat autokorelasi pada model regresi

H_a : terdapat autokorelasi pada model regresi

Kaidah keputusan pada uji autokorelasi metode Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

- 1) $dU < DW < 4 - dU$ maka H_0 diterima, yang artinya tidak terdapat autokorelasi
- 2) $DW < dL$ atau $DW > 4 - dL$ maka H_0 ditolak, yang artinya terdapat autokorelasi
- 3) $dL < DW < dU$ atau $4 - dU < DW < 4 - dL$ yang artinya pada model regresi tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti

Namun terdapat kriteria dalam pengambilan keputusan, yaitu apabila nilai DW berada diantara -2 dan +2 ($-2 < dw < +2$) maka tidak terjadi autokorelasi.

Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi:

Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Signifikansi
C	0,401167	30,08286	0,0000
X	-1,18E-06	-3,748146	0,0003
Durbin-Watson stat	1,498671		
F-Statistik	65,44454		
Signifikansi (F-Statistik)	0,000000		

Sumber: Data Diolah dengan Eviews

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai DW adalah 1,498671 dimana nilai ini berada diantara -2 dan +2 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.

4. Uji Kelayakan Model Regresi

a. Uji t

Uji parsial adalah pengujian yang berfungsi untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara variabel independen secara individu terhadap variabel dependen atau tidak. Hipotesis penelitian pada uji parsial adalah:

$H_0 : B_1 = 0$; jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat disparitas pendapatan

$H_a : B_2 \neq 0$; jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat disparitas pendapatan

Berdasarkan output nilai FEM pada kolom t-statistik diperoleh nilai t hitung PDRB Perkapita adalah -3,748146 dan didapatkan t tabel sebesar 1,97427. Nilai t hitung negatif (-3,748146) lebih kecil dibandingkan dengan t tabel negatif (-1,97427). Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan uji t maka H_0 ditolak sehingga H_a diterima. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat PDRB perkapita berpengaruh secara signifikan terhadap disparitas pendapatan.

b. Uji R Squared

Berdasarkan output regresi *Fixed Effect Model* (FEM) pada kolom R-squared didapatkan nilai R-squared model regresi sebesar 0,942799. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh PDRB perkapita terhadap ketimpangan pendapatan provinsi di Indonesia adalah 94,2799% dan sisanya disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

5. Interpretasi Model Regresi

Setelah diketahui seberapa berpengaruhnya variabel PDRB Perkapita terhadap variabel disparitas pendapatan antar provinsi di Indonesia pada tahun 2017-2021 dari hasil analisis regresi data panel yang telah dilakukan maka didapatkanlah persamaan sebagai berikut dari hasil regresi yang dilakukan dengan model terpilih yaitu *fixed effect model*:

$$\hat{Y} = 0,401167 - 1,18E-06 X$$

Interpretasi:

- Nilai koefisien konstanta (α) positif 0,401167 artinya jika nilai PDRB perkapita bernilai nol, maka rata-rata tingkat disparitas (Y) sebesar 0,401167 dimana nilai tersebut berasal dari pengaruh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.
- Koefisien regresi variabel PDRB perkapita (X) sebesar -1,18E-06 yang artinya terdapat hubungan yang berlawanan arah antara PDRB perkapita (X) dengan disparitas pendapatan (Y) karena koefisien yang bernilai negatif. Sehingga jika PDRB perkapita (X) meningkat 1 persen, maka rata-rata tingkat disparitas pendapatan (Y) akan menurun sebesar -1,18% dengan asumsi faktor lain tetap.

6. Analisis Temuan

Temuan analisis ini mengungkap bahwa tingkat PDRB perkapita (X) negatif terhadap tingkat disparitas pendapatan provinsi-provinsi di Indonesia (Y) yang terlihat pada hasil uji t dimana pada kolom uji t didapatkan nilai -3,74146 dan t tabel sebesar -1,97427 yang artinya t hitung lebih kecil dibandingkan dengan t tabel sehingga H_0 ditolak berdasarkan pada kriteria pengambilan keputusan yang artinya tingkat PDRB Perkapita memiliki pengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan. Besarnya pengaruh ini dapat dilihat dari analisis koefisien determinasi (R Squared) yang didapatkan hasil pengaruh tingkat PDRB perkapita terhadap disparitas pendapatan adalah 94,42% yang artinya tingkat PDRB perkapita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap disparitas pendapatan.

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu tentang analisis pengaruh tingkat PDRB Perkapita terhadap disparitas pendapatan di Indonesia periode 2019-2021 oleh Miftahul Janah (2022). Hasil penelitian mengatakan jika Produk Domestik Regional Bruto Perkapita memiliki pengaruh negatif terhadap disparitas pendapatan di Indonesia tahun 2019-2020. Dimana terdapat perbedaan PDRB perkapita yang mencolok pada masing-masing wilayah di Indonesia yang disebabkan oleh perbedaan sektor penggerak perekonomian di masing-masing daerah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan konsep teoritis oleh Kuznet (Arsyad, 2010) yang mengatakan bahwa adanya kesenjangan ekonomi antar wilayah atau antar masyarakat dapat dipicu oleh proses pembangunan yang terjadi pada suatu negara pada batas-batas tertentu. Menurut analisis Kuznet terdapat hubungan singkat antara tingkat pendapatan perkapita dengan disparitas pendapatan berbentuk U terbalik yang artinya pada tahapan awal pertumbuhan ekonomi disparitas pendapatan akan memburuk yang artinya pendapatan tidak terdistribusi dengan baik, selanjutnya pada tahapan yang lebih lanjut disparitas pendapatan akan menurun sejalan dengan membaiknya distribusi pendapatan. Penelitian ini sejalan dengan dasar teori tersebut dimana PDRB perkapita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap disparitas pendapatan provinsi di Indonesia.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan konsep pembangunan dalam perspektif Ekonomi Islam dimana dalam ajaran Islam dikatakan bahwa harta yang diperoleh bukan hanya milik pribadi melainkan terdapat hak-hak orang lain dan Allah memerintahkan manusia untuk mendistribusikan harta tersebut agar tidak beredar pada sebagian golongan saja. Pendistribusian harta tersebut bisa dilakukan dengan mekanisme ekonomi seperti jual beli maupun dengan mekanisme non ekonomi seperti bantuan dari negara untuk masyarakat yang membutuhkan, zakat dan waris.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh PDRB Perkapita terhadap disparitas pendapatan provinsi di Indonesia tahun 2017-2021 dalam perspektif Islam diperoleh hasil yaitu:

PDRB Perkapita ditunjukkan dengan nilai PDRB Perkapita menurut provinsi-provinsi di Indonesia. Variabel ini memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan antar provinsi di Indonesia. Pengaruh PDRB Perkapita terhadap disparitas pendapatan antar provinsi di Indonesia sebesar 94,2799%.

Disparitas pendapat menurut islam dapat dikurangi dengan adanya pendistribusian pendapatan yang baik. Pendistribusian pendapatan menurut Islam terdapat dua mekanisme yaitu secara ekonomi dan non ekonomi. Secara ekonomi dapat dilakukan dengan pengendalian kegiatan ekonomi seperti jual beli dan menurut mekanisme non ekonomi pendistribusian kekayaan dapat dilakukan dengan pemberian negara kepada rakyat yang membutuhkan, zakat, shadaqah dan waris.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Pemerintah kedepannyadiharapkan untuk lebih memperhatikan daerah yang memiliki tingkat disparitas pendapatan tinggi agar kedepannya peningkatan jumlah penduduk akan sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga disparitas pendapatan wilayah tersebut akan menurun.

Dengan adanya peningkatan pendapatan daerah diharapkan adanya pendistribusian pendapatan yang baik sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat sama-sama mencapai kesejahteraan.

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai hingga pelosok daerah sehingga tidak ada lagi setelah ini anak-anak yang putus sekolah karena alasan jarak dan biaya agar adanya peningkatan kualitas angkatan kerja kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YPKM.

Khotami, W. (2019). *Ekonomi Pembangunan*. Banjarmasin: Akademi Maritim Nusantara.

Jurnal:

Kalsum, U. 'Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam'. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. 3. 1. (2018), 42.

Maryam Jamilah An Hasibuan, A. R. 'Pemodelan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Bootstrap Aggregating Multivariate Adaptive Regression Splines (Bagging Mars)'. *Jurnal Gaussian*. 8. 1 (2019) 140.

Nurhayati, S. H. 'Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi dan Hubungannya Dengan Investasi Di Provinsi Jambi Tahun 2002-2014'. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. 10. 2. (2015), 304.

Qodir, A. 'Efisiensi Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam'. *Mozaiik Islam Nusantara*. 7. 5. (2021), 55.

Silastri, N. 'Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kuantan Singingi'. *JOM Fekon*. 4. 1 (2017), 115.